

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Resistensi masyarakat pesisir terhadap PP No. 26 Tahun 2023 merupakan bentuk resistensi terbuka. Seperti yang dijelaskan oleh James C. Scott terkait resistensi terbuka, bahwa resistensi yang dilakukan masyarakat secara langsung dan kolektif dalam menentang kebijakan negara yang dianggap merugikan masyarakat. Bentuk-bentuk resistensi yang muncul berupa audiensi dengan pemerintah, aksi diam, unjuk rasa, deklarasi, orasi dan juga aksi simbolik. Berbagai aksi ini dikatakan sebagai resistensi terbuka karena memiliki tujuan perubahan yang bersifat rasional dan masyarakat dalam kondisi memiliki kemampuan untuk melakukan resistensi terbuka. Terdapat beberapa aksi yang dilakukan masyarakat pesisir dengan adanya peran dari intelektual organik yang dijelaskan oleh Gramsci dalam *counter hegemony* yang ada pada LSM. Dalam aksi ini, sebagai intelektual organik, LSM membangun kesadaran masyarakat melalui kegiatan advokasi, kampanye dan aksi protes publik dengan memobilisasi massa dan koneksi yang menghubungkan dengan masyarakat politik. Peran tersebut menunjukkan fungsi LSM sebagai penggerak ideologis yang membentuk *counter hegemony* terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat pesisir.

Adapun faktor kontekstual yang melatarbelakangi munculnya resistensi masyarakat pesisir terhadap PP No. 26 Tahun 2023 yaitu pengalaman historis dan ketika ekonomi masyarakat pesisir terganggu. Berdasarkan faktor-faktor kontekstual yang ada bahwa faktor utama yang mendasari masyarakat pesisir

melakukan resistensi terhadap PP No. 26 Tahun 2023 yaitu faktor ekonomi. Ketergantungan masyarakat pesisir terhadap sumber daya laut menjadikan wilayah pesisir sebagai ruang hidup sekaligus sumber penghidupan. Ketika kebijakan pemerintah seperti PP No. 26 Tahun 2023 yang mengatur tambang pasir laut berpotensi merusak ekosistem pesisir dan mengancam keberlangsungan sumber pendapatan masyarakat. Maka alasan tersebut akan menganggu keseimbangan ekonomi masyarakat pesisir. Adanya kerusakan wilayah tangkap ikan, peningkatan biaya operasional dan menurunnya hasil tangkapan membuat masyarakat kehilangan kemampuan untuk mencari pendapatan yang menguntungkan. Kondisi ini menjadi dasar masyarakat pesisir melakukan resistensi sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap lebih berpihak pada masyarakat ekonomi dibandingkan perlindungan ekonomi masyarakat pesisir.

